

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan hukum bagi rakyat di Indonesia: Sebuah studi tentang prinsip-prinsipnya, penanganannya oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum dan pembentukan peradilan administrasi negara*. Surabaya: PT Bina Ilmu.
- Fuady, M. (1997). *Pembiayaan perusahaan masa kini: Tinjauan hukum bisnis* (hlm. 139–143). Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Fuady, M. (2002). *Pengantar hukum bisnis: Menata bisnis modern di era global*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Fuady, M. (2007). *Hukum kontrak: Dari sudut pandang hukum bisnis* (Buku Kedua). Bandung: Refika Aditama.
- Hernoko, A. Y. (2010). *Hukum perjanjian: Asas proporsionalitas dalam kontrak komersial*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Khairandy, R. (2013). *Hukum kontrak Indonesia dalam perspektif perbandingan* (Bagian Pertama). Yogyakarta: FH UII Press.
- Badrulzaman, M. D. (1994). *Aneka hukum bisnis*. Bandung: Alumni.
- Badrulzaman, M. D. (2001). *Kompilasi hukum perikatan*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Khairandy, R. (2017). *Iktikad baik dalam kontrak di berbagai sistem hukum*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Kristiyanti, C. T. S. (2019). *Hukum perlindungan konsumen* (Cet. ke-6). Jakarta: Sinar Grafika.
- Miru, A. (2007). *Hukum kontrak dan perancangan kontrak*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Muhammad, A. (2004). *Hukum perjanjian*. Bandung: PT Alumni.

- Prasetyo, T. (2020). *Keadilan bermartabat: Perspektif teori hukum*. Bandung: Nusa Media.
- Rahardjo, S. (2014). *Ilmu hukum* (Cet. ke-8). Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Simamora, Y. S. (2009). *Hukum perjanjian: Prinsip hukum kontrak pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah*. Yogyakarta: LaksBang PRESSindo.
- Soekanto, S. (2015). *Pengantar penelitian hukum*. Jakarta: UI Press.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2010). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Subekti, R. (2002). *Hukum perjanjian* (Cet. ke-19). Jakarta: PT Intermedia.
- Sumardi, J. (1995). *Aspek-aspek hukum franchise dan perusahaan transnasional*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Susanto, H. (2008). *Hak-hak konsumen jika dirugikan*. Jakarta: Visimedia.
- Widjaja, G. (2002). *Seri hukum bisnis: Lisensi*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

B. Jurnal dan Artikel Ilmiah

- Amalia, F., & Wahyuningsih, S. E. (2020). Sertifikasi halal UMKM: Hambatan dan solusi dalam ekosistem waralaba F&B di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 5(2), 143–158.
- Astutik, D. P. (2020). Perlindungan hukum terhadap franchisee yang dirugikan oleh franchisor dalam perjanjian waralaba. *RechtIdee*, 15(2). [https://doi.org/ 10.21107/ri.v15i2.8503](https://doi.org/10.21107/ri.v15i2.8503)
- Dewi, E. S. (2021). Literasi hukum pelaku UMKM terhadap perjanjian kontrak baku dalam praktik bisnis waralaba. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 16(1), 1–15. <https://doi.org/10.33059/jhsk.v16i1.2943>
- Mentari. (2024). Aspek hukum perjanjian waralaba dalam perspektif perlindungan mitra usaha kecil dan menengah (UMKM). *Jurnal Legalitas*, 2(1), 1–20. Diakses pada 12 November 2025, pukul 08.17 WIB, dari <https://ojsstihpertiba.ac.id/index.php/jle/article/view/164>

- Ningsih, A. S., & Hakim, B. (2021). Sinkronisasi regulasi kemitraan usaha besar dan UMKM dalam kerangka Undang-Undang Cipta Kerja. *Jurnal Ius Constituendum*, 6(2), 389–412. <https://doi.org/10.26623/jic.v6i2.3683>
- Nugroho, R. A. (2023). Perlindungan hukum bagi para pihak akibat wanprestasi dalam perjanjian franchise pada Putusan Nomor 72/PDT.G/2013/PN.KDI. *Semarang Law Review*, 4(1), 1–15.
- Nugroho, S. A. (2019). Perlindungan hukum terhadap franchise lokal dalam perjanjian waralaba: Analisis terhadap keseimbangan hak dan kewajiban para pihak. *Jurnal Privat Law*, 7(2), 191–200.
- Putri, I. R. (2023). Tinjauan yuridis terhadap sengketa penipuan dalam praktik waralaba. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(14), 1–12.
- Putrie, A. S., Dewi, N., & Nurwanti, Y. D. (2025). Analisis hukum terhadap wanprestasi pada perjanjian waralaba berbasis kontrak baku. *Jurnal Tana Mana*, 6(1), 1–14.
- Ramadan, F., & Mulyadi, I. (2025). Keseimbangan kedudukan para pihak dalam perjanjian franchise di era Gen Z: Analisis normatif terhadap prinsip kebebasan berkontrak dan keadilan kontraktual. *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 3(2), 1–18.
- Safitri, W. (2020). Perlindungan hukum kontrak bisnis waralaba di Indonesia dalam perspektif keadilan. *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(2), 1–12.
- Sari, D. P., & Purwanto, H. (2022). Peran pemerintah daerah dalam perlindungan hukum usaha mikro kecil dan menengah berbasis waralaba. *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, 5(1), 76–89. <https://doi.org/10.30996/jhbbc.v5i1.5823>
- Setiawan, I. (2024). Perlindungan hukum bagi franchisee dalam perjanjian waralaba yang tidak terdaftar (Studi Putusan Nomor 3/Pdt. G.S/ 2023/ PN.JKT.UTR). *Lex Patrimonium*, 3(2), 1–20. Diakses pada 25 Januari 2026, pukul 19.42 WIB, dari <https://scholarhub.ui.ac.id/lexpatri/vol3/iss2/12>

- Sugiono, M. A., Hasanah, S. D., & Sumriyah. (2023). Analisis aspek hukum perjanjian waralaba (franchise) dalam perspektif hukum perdata. *Journal Sains Student Research*, 1(2), 1082–1087. <https://doi.org/10.61722/jssr.v1i2.463>
- Syafi. (2025). Kepastian hukum dan perlindungan terhadap pelaku UMKM dalam perjanjian waralaba. *Jurnal Hukum Bisnis dan Kewirausahaan*, 4(1), 1–16.
- Utami, S. W., & Haryono, B. S. (2021). Strategi pengembangan UMKM melalui sistem waralaba lokal di Indonesia. *Jurnal Administrasi Bisnis*, 93(2), 120–131.

C. Website dan Sumber Online

- Badan Pusat Statistik Republik Indonesia. (2023). KemenKopUKM gandeng BPS lakukan pendataan lengkap koperasi dan UMKM 2023. Diakses pada 21 November 2025, pukul 09.35 WIB, dari <https://www.bps.go.id/en/news/2023/09/15/533>
- Badan Pusat Statistik Republik Indonesia. (2024). Penyampaian hasil penghitungan data makro ekonomi UMKM. Diakses pada 8 Desember 2025, pukul 14.28 WIB, dari <https://www.bps.go.id>
- Fauzan, M. (2025, Januari 22). Perkembangan data UMKM Indonesia. Goodstats. Diakses pada 14 Februari 2026, pukul 20.11 WIB, dari <https://data.goodstats.id>
- Firmanda, F., Thalia, E., & Phahlevy, R. R. (2023). Perlindungan produk usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dalam penataan perizinan waralaba di Indonesia. ResearchGate. Diakses pada 27 Maret 2026, pukul 11.53 WIB, dari <https://www.researchgate.net>
- Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional. (2024). Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2024 tentang Waralaba. Diakses pada 5 April 2026, pukul 16.24 WIB, dari <https://jdihn.go.id>

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia. (2024). Data UMKM Indonesia. Diakses pada 18 April 2026, pukul 07.49 WIB, dari <https://satudata.kemenkopukm.go.id>

Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. (2024). OPAC Perpustakaan Nasional RI. Diakses pada 2 Juni 2026, pukul 21.07 WIB, dari <https://opac.perpusnas.go.id>

D. Peraturan Perundang-Undangan

Pemerintah Republik Indonesia. (1999). Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Jakarta: Sekretariat Negara.

Pemerintah Republik Indonesia. (2007). Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba. Jakarta: Sekretariat Negara.

Pemerintah Republik Indonesia. (2008). Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Jakarta: Sekretariat Negara.

Pemerintah Republik Indonesia. (2024). Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2024 tentang Waralaba. Jakarta: Sekretariat Negara.